



RENCANA KINERJA TAHUN 2024

# RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2024



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5, Jakarta Pusat

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sebagai dasar dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L) dan dokumen Penetapan Kinerja (PK).

Semoga Rencana Kinerja Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dalam mewujudkan Capaian Tugas Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Jakarta , Januari 2023

**SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

Heri Sudarmaji  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19660907 199403 1 001

**DAFTAR ISI  
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024**

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>Bab I    PENDAHULUAN</b>	
A.    Gambaran Umum .....	I-1
B.    Tugas Pokok .....	I-2
C.    Struktur Organisasi .....	I-2
<b>Bab II    PERENCANAAN STRATEGIS</b>	
A.    Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 .....	II-1
B.    Rencana Kinerja 2020-2024 .....	II-3
<b>Bab III    RENCANA KINERJA</b>	
A.    Indikator Kinerja 2024 .....	III-1
B.    Target Kinerja 2024 .....	III-2
C.    Data Analisis Capaian Kinerja 2024 .....	III-4
<b>Bab IV    P E N U T U P</b> .....	IV-1

**LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024 SEKRETARIAT BPSDM PERHUBUNGAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan satuan organisasi setingkat eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, perumusan kinerja, pengolahan dan pengelolaan data, pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pelaporan serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Penyiapan manajemen sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, pengelolaan reformasi birokrasi, pembinaan tata Kelola badan layanan umum, pelaksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparatur sipil Negara, serta pengendalian gratifikasi;
- c. Penyiapan pembinaan dan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pengelolaan keuangan badan layanan umum, penerimaan negara bukan pajak, akuntansi keuangan, barang milik negara, dan tindak lanjut hasil audit, pemeriksaan dan/ atau pengawasan; dan
- d. Penyiapan urusan tata usaha, kerumahtanggaan, keprotokolan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi, pelaksanaan advokasi, penyusunan dokumen kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri, sosialisasi, hubungan masyarakat, publikasi,

dokumentasi, promosi, keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan data dan teknologi informasi.

## **B. Tugas Pokok**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, tugas pokok Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah sebagai berikut:

**Tugas:** Pasal 667 menyatakan bahwa Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

## **C. Struktur Organisasi**

Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan adalah terdiri dari:

### **1. Bagian Perencanaan**

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, perumusan kinerja, pengolahan dan pengelolaan data, pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pelaporan, serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, rapat pimpinan, pelaksanaan pertemuan dengan lembaga tinggi negara, dan bimbingan teknis penyusunan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi, rapat koordinasi, penetapan Indikator Kinerja, penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan penerimaan calon taruna secara terpusat; dan
- c. penyiapan bahan pengolahan dan pengelolaan data, penyusunan target kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, analisis dan evaluasi kinerja, serta pelaporan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Bagian Perencanaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2. Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)**

Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan manajemen sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, pembinaan tata Kelola Badan Layanan Umum, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengendalian gratifikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan sumber daya manusia, penerimaan, pengangkatan, dan penempatan calon aparatur sipil negara, penataan organisasi, tata laksana, pengelolaan reformasi birokrasi, pemutakhiran basis data sumber daya manusia, serta pembinaan tata Kelola badan layanan umum;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pembinaan jiwa korps aparatur, asesmen jabatan

- fungsional, pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah, serta pembinaan pengasuhan; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan karir, disiplin, administrasi sumber daya manusia, kesejahteraan sumber daya manusia, inpassing, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, serta pengendalian gratifikasi.

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

### **3. Bagian Keuangan**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Penerimaan Negara Bukan Pajak, akuntansi keuangan, Barang Milik Negara, dan tindak lanjut hasil audit, pemeriksaan dan/ atau pengawasan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran, usulan revisi anggaran, pengumpulan data dukung dan evaluasi terkait dengan laporan hasil audit, pemeriksaan dan/atau pengawasan, serta pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. penyiapan bahan penyusunan pemantauan pelaksanaan anggaran dan realisasi daya serap, usulan pengelola anggaran, penyusunan, pengelolaan dan evaluasi laporan keuangan serta pertanggungjawaban perbendaharaan; dan
- c. penyiapan bahan dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara.

Bagian Keuangan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **4. Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan tata usaha, kerumahtanggaan, keprotokolan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi, pelaksanaan advokasi, penyusunan dokumen kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri, sosialisasi, hubungan masyarakat, opini publik, publikasi, dokumentasi, promosi, keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan data dan teknologi informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan urusan dalam, ketatausahaan, pemeliharaan fasilitas Sumber Daya Manusia, kantor, pengelolaan perpustakaan, layanan kesehatan, keprotokolan, dan pelaksanaan rapat kedinasan, serta penanggulangan darurat akibat bencana;
- b. penyiapan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan, ratifikasi konvensi internasional, penelaahan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, penyusunan dokumen kerja sama dengan instansi/lembaga dalam negeri dan luar negeri, serta sosialisasi; dan
- c. penyiapan bahan dan pembinaan hubungan masyarakat, publikasi, dokumentasi, promosi, keterbukaan informasi publik, serta pengelolaan data dan teknologi informasi.

Bagian Umum terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dapat digambarkan sebagai berikut:



## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024**

#### **A. Sasaran Kegiatan 2020-2024**

Perumusan Sasaran Kegiatan Sekretariat BPSDM Perhubungan didasarkan pada hasil penurunan Sasaran-sasaran baik Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK) yang terdapat pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang merupakan turunan dari Sasaran strategis Kementerian Perhubungan. Sasaran Program/ Kegiatan Sekretariat BPSDM Perhubungan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik;
- b. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum;
- c. Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan;
- d. Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel;
- e. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BPSDMP;
- f. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan;
- g. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP.

#### **1. Kebijakan dan Strategi Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2020-2024**

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat, maka kebijakan Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan dan mengoptimalkan kapasitas dan utilitas sarana dan prasarana diklat perhubungan serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap Pendidikan dan Pelatihan bidang Transportasi di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan sektor transportasi yang dilaksanakan secara efektif dan efisien;

- b. Meningkatkan kecukupan dan kualitas SDM bidang Transportasi baik SDM Pendidik maupun non pendidik guna menghasilkan lulusan diklat yang maju, mandiri, kompeten, berdaya saing dan memberikan nilai tambah;
- c. Meningkatkan dan menyesuaikan kelembagaan unit kerja di lingkungan BPSDM Perhubungan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan kinerja organisasi;
- d. Mendorong perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur dan strategi pendidikan dan pelatihan serta sistem informasi SDM Perhubungan dalam rangka pengembangan SDM perhubungan.

## 2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai masing – masing sasaran strategis di lingkungan Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai berikut:

- SP.WA.03 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
  - IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan (Indeks).
- SP.WA.02 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum.
  - IKP 2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapatkan *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan / Ditetapkan (Rasio).
- SK.WA.03.01 Meningkatkan Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan.
  - IKK 8. Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP (%).
- SK.WA.03.03 Meningkatkan Birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan Akuntabel.
  - IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP (Level);
  - IKK 14. Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP (Nilai);

- IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP (Nilai);
- IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP (Nilai);
- IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP (Nilai);
- IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP (Nilai);
- IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP (Nilai).
- SK.WA.02.01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BPSDMP.
  - IKK 20. Indeks Reformasi Hukum BPSDMP (Indeks).
- SK.WA.03.04 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan.
  - IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP (Nilai);
  - IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP (Indeks);
  - IKK 24. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP (Nilai).
- SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP.
  - IKK 25. Indeks SPBE Kementerian Perhubungan (%).

## B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024 Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memiliki beberapa target yang ingin dicapai sebagaimana yang dijelaskan pada table 2.1 dibawah ini.

**Tabel 2.1**

Rencana Kegiatan Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA (IK)		TARGET	SATUAN
SP.WA.03	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan;	80	Indeks

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA (IK)		TARGET	SATUAN
SP.WA.02	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKP 2	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapatkan <i>Class Action</i> oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan / Ditetapkan (Rasio).	0,1	Rasio
SK.WA.03.01	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan.	IKK 8	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP.	100	%
SK.WA.03.03	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan Akuntabel.	IKK 13	Indeks Maturitas SPIP BPSDMP;	3,5	Level
		IKK 14	Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP;	91,9	Nilai
		IKK 15	Indeks Pengelolaan aset BPSDMP;	78	Nilai
		IKK 16	Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP;	88,2	Nilai

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA (IK)		TARGET	SATUAN
		IKK 17	Indeks Perencanaan BPSDMP;	84	Nilai
		IKK 18	Nilai SAKIP BPSDMP;	90	Nilai
		IKK 19	Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP.	73	Nilai
SK.WA.02.01	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BPSDMP.	IKK 20	Indeks Reformasi Hukum BPSDMP.	90	Indeks
SK.WA.03.04	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan.	IKK 23	Indeks Kelembagaan BPSDMP;	79,5	Nilai
		IKK 9.2	Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP;	74	Indeks
		IKK 24	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP.	0,96	Nilai
SK.WA.03.05	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP.	IKK 25	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan.	100	%

**BAB III**  
**PERENCANAAN KINERJA**  
**SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**  
**TAHUN 2024**

**A. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja Sekretariat Badan Pengembangan SDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- SP.WA.03      Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah yang Baik.  
IKP 1.      Indeks RB Kementerian Perhubungan (Indeks).
- SP.WA.02      Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum.  
IKP 2.      Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapatkan *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan / Ditetapkan (Rasio).
- SK.WA.03.01    Meningkatkan Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan.  
IKK 8.      Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP (%).
- SK.WA.03.03    Meningkatkan Birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan Akuntabel.  
IKK 13.     Indeks Maturitas SPIP BPSDMP (Level);  
IKK 14.     Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP (Nilai);  
IKK 15.     Indeks Pengelolaan aset BPSDMP (Nilai);  
IKK 16.     Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP (Nilai);  
IKK 17.     Indeks Perencanaan BPSDMP (Nilai);  
IKK 18.     Nilai SAKIP BPSDMP (Nilai);  
IKK 19.     Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP (Nilai).

- SK.WA.02.01 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BPSDMP.  
IKK 20. Indeks Reformasi Hukum BPSDMP (Indeks).
- SK.WA.03.04 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan.  
IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP (Nilai);  
IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP (Indeks);  
IKK 24. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP (Nilai).
- SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP.  
IKK 25. Indeks SPBE Kementerian Perhubungan (%).

## B. Target Kinerja

Sesuai dengan Indikator Kinerja Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2024, maka target kinerja Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA (IK)		TARGET	SATUAN
SP.WA.03	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan;	80	Indeks
SP.WA.02	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKP 2	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapatkan <i>Class Action</i> oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri	0,1	Rasio

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA (IK)		TARGET	SATUAN
			Perhubungan yang Dikeluarkan / Ditetapkan (Rasio).		
SK.WA.03.01	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan.	IKK 8	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP.	100	%
SK.WA.03.03	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan Akuntabel.	IKK 13	Indeks Maturitas SPIP BPSDMP;	3,5	Level
		IKK 14	Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP;	91,9	Nilai
		IKK 15	Indeks Pengelolaan aset BPSDMP;	78	Nilai
		IKK 16	Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP;	88,2	Nilai
		IKK 17	Indeks Perencanaan BPSDMP;	84	Nilai
		IKK 18	Nilai SAKIP BPSDMP;	90	Nilai
		IKK 19	Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP.	73	Nilai

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA (IK)		TARGET	SATUAN
SK.WA.02.01	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BPSDMP.	IKK 20	Indeks Reformasi Hukum BPSDMP.	90	Indeks
SK.WA.03.04	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan.	IKK 23	Indeks Kelembagaan BPSDMP;	79,5	Nilai
		IKK 9.2	Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP;	74	Indeks
		IKK 24	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP.	0,96	Nilai
SK.WA.03.05	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP.	IKK 25	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan.	100	%

### C. Data Analisis Capaian Kinerja

#### 1. SP.WA.03 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

##### IKP 1 Indeks RB Kementerian Perhubungan

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi merupakan hasil pengukuran atas kinerja organisasi Kementerian Perhubungan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penilaian ini

dilakukan oleh Kementerian PAN-RB. Pada Tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan ditargetkan sebesar 80.

2. SP.WA.02 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum IKP 2 Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapatkan *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/ Ditetapkan

Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapatkan *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/ Ditetapkan diperoleh dari rasio jumlah peraturan Menteri Perhubungan yang mendapatkan "*Class Action*" atau gugatan dari masyarakat dibandingkan dengan jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang dikeluarkan/ditetapkan, dengan rentan rasio antara 1 s.d 0, dimana:

- a. Seluruh regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenhub di "*Class Action*" oleh masyarakat;
- b. Seluruh regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenhub tidak di "*Class Action*" oleh masyarakat.

Dengan demikian, semakin rendah nilai rasio yang diperoleh, maka kinerja indikator ini semakin baik.

Pada Tahun 2024, target indikator kinerja IKP 2. Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapatkan *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/ Ditetapkan sebesar 0,1.

Persentase capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan persentase capaian keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapatkan *Class Action* oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan/Ditetapkan sudah baik, yang ditandai dengan tidak adanya *Class Action* (gugatan) dari masyarakat terhadap regulasi di bidang perhubungan atas peraturan yang menyangkut BPSDM Perhubungan pada tahun 2024.

3. SK.WA.03.01 Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan

BPSDM Perhubungan

IKK 8 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan

Kualitas pelaksanaan kerjasama dan kemitraan BPSDM ini direpresentasikan dengan prosentase jumlah dokumen kerjasama yang telah ditindaklanjuti pada tahun 2024 dibandingkan dengan jumlah keseluruhan target dokumen kerjasama yang ditindaklanjuti pada Tahun 2024 di lingkup Sekretariat BPSDM Perhubungan, yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

Kualitas Pelaksanaan  
Kerjasama dan  
Kemitraan

$$= \frac{\text{Jumlah dokumen kerjasama Yang telah ditindaklanjuti tahun (n)}}{\text{Jumlah keseluruhan target dokumen Kerjasama yang ditindaklanjuti pada tahun (n)}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2024 Target kualitas pelaksanaan kerjasama dan kemitraan BPSDM sebesar 100% (5 dari 5 dokumen). Realisasi jumlah dokumen kerja

sama yang ditindaklanjuti sebesar 5 dari 5 dokumen kerja sama yang ditargetkan, sehingga capaian sebesar 100%.

4. SK.WA.03.03 Meningkatkan Birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan Akuntabel

IKK 13 Indeks Maturitas SPIP BPSDMP

Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPSDMP pada Tahun 2024 ditargetkan pada level 3,5.

IKK 14 Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP

Indeks Pengawasan Kearsipan Sekretariat BPSDMP ditargetkan pada nilai 91,9.

IKK 15 Indeks Pengelolaan aset BPSDMP

Penilaian Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP terdiri dari 2 Indikator yaitu Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan penetapan status penggunaannya (50%) dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN (50). Target Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP Tahun 2024 sebesar 78.

#### IKK 16 Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP

Indeks Pengelolaan Keuangan Sekretariat BPSDMP diukur dengan formulasi penjumlahan dari 2 (dua) komponen nilai, yaitu: Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot sebesar 60% dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot sebesar 40%, sebagaimana formulasi berikut:

Indeks Pengelolaan Keuangan Sekretariat BPSDMP  
= (60% x Nilai EKA) + (40% x Nilai IKPA).

Target nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Sekretariat BPSDMP tahun 2024 sebesar 88,2.

#### IKK 17 Indeks Perencanaan BPSDMP

Indeks Perencanaan BPSDMP merupakan tingkat kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang perhubungan, yang merupakan penilaian terhadap aspek kemanfaatan dokumen perencanaan yang terpadu berdasarkan kesesuaian antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik lingkup nasional maupun bidang untuk menghindari terjadinya duplikasi dan ketidaksesuaian antara perencanaan, pemrograman dan penganggaran.

Penilaian tingkat kesesuaian dan keterpaduan dilakukan berdasarkan aspek Integrasi Perencanaan, dengan bobot sebagai berikut:

NO	ASPEK	BOBOT
A	Integrasi Perencanaan	
1	Persentase Kesesuaian sasaran program renstra K/L dengan sasaran RPJMN*)	20%
2	Persentase kesesuaian sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN	20%
3	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, dan KP dalam RKP	30%
4	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran Renstra K/L **)	30%
Total Integrasi Perencanaan		100%

Pada Tahun 2024, target Indeks Perencanaan Sekretariat BPSDMP sebesar 84.

#### IKK 18 Indeks SAKIP BPSDM Perhubungan

Target nilai SAKIP BPSDM Perhubungan Tahun 2024 sebesar 90.

#### IKK 19 Tingkat Penyelenggaraan perkantoran

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan instansi di lingkungan BPSDM Perhubungan dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap pimpinan serta setiap pegawai Kementerian Perhubungan yang bertempat di kantor sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan perkantoran di lingkungan BPSDM Perhubungan.

Lingkup penyelenggaraan perkantoran meliputi aspek K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Cara penghitungan Tingkat penyelenggaraan perkantoran BPSDMP adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BOBOT	KETERANGAN
1	Tingkat Layanan Rumah Tangga	20	(RKA Tepat Waktu; LKIP Tepat Waktu; Kinerja Anggaran; % Pemenuhan Dokumen RENSTRA; % Pencapaian Indeks Maturitas SPIP>3) PMK 214/PMK.02/2017
2	% Kesesuaian Pencatatan Aset BMN	5	- (%) Jumlah aset yang dicatat pada tahun (n) dibandingkan dengan Jumlah aset yang sudah terealisasi pada tahun (n) x total nilai; - Pencatatan aset BMN di tahun (n) pada aplikasi SIMAK BMN tahun (n); - Apabila tidak terdapat realisasi aset ditahun (n) maka nilai 5.
3	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkantoran	5	- % Jumlah Sarana perkantoran yang terealisasi

NO	URAIAN	BOBOT	KETERANGAN
			pada tahun (n) dibandingkn Jumlah sarana perkantoran dengan target sesuai kebutuhan pada tahun (n) x total nilai; - Apabila tidak terdapat target/usulan ditahun (n) maka nilai 5.
4	Tingkat Kehandalan Sarana Perkantoran	10	(%) Jumlah sarana perkantoran yang dapat digunakan secara optimal dibandingkan jumlah sarana yang tercatat di BMN x total nilai.
5	Tingkat Layanan	60	Kuesioner indeks pelayanan.

Target nilai Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP tahun 2024 sebesar 73.

5. SK.WA.02.01 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi Dan Hukum BPSDMP

IKK 20 Indeks Reformasi Hukum BPSDMP

Indeks Reformasi Hukum Kementerian Perhubungan merupakan deregulasi peraturan di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu simplifikasi atau penyederhanaan peraturan, penghilangan tumpang tindih peraturan, dan penyelerasan antar peraturan satu dengan

peraturan yang lain. Target nilai Indeks Reformasi Hukum BPSDMP pada tahun 2024 sebesar 90.

6. SK.WA.03.04 Meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan

IKK 23 Indeks Kelembagaan BPSDMP

Indeks Kelembagaan merupakan hasil evaluasi kelembagaan instansi pemerintah yang mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup tiga subdimensi, antara lain:

- 1) Kompleksitas;
- 2) Formalisasi; dan
- 3) Sentralisasi.

Sedangkan dimensi proses organisasi mencakup 5 (lima) subdimensi, yakni:

- 1) Keselarasan (*Alignment*);
- 2) Tata Kelola (*Governance*) Dan Kepatuhan (*Compliance*);
- 3) Perbaikan Dan Peningkatan Proses;
- 4) Manajemen Risiko; Dan
- 5) Teknologi Informasi.

Evaluasi terhadap kedua dimensi pokok organisasi dimaksud merupakan langkah awal untuk membangun suatu sistem evaluasi lembaga instansi pemerintah yang dapat memotret keberadaan organisasi pemerintah secara dinamis dalam konteks meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja organisasi. Target Indeks Kelembagaan BPSDMP tahun 2024 sebesar 79,5.

#### IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP

Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP merupakan Instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN di lingkungan BPSDM Perhubungan yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN yang mencakup dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin.

Target Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP tahun 2024 sebesar 74.

#### IKK 24 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP

Indeks Tata Kelola manajemen ASN BPSDMP merupakan Instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN yang mencakup dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin.

Dokumen HCDP (*Human Capital Development Plan*) Merupakan dokumen perencanaan pengembangan pegawai. Setiap individu pegawai pengembangan kompetensinya sudah direncanakan, jangka pendek dan jangka menengahnya), dari pengembangan kompetensi berdasarkan pendidikan formal maupun non formal (kompetensi teknis/manajerial). Indeks Tata Kelola manajemen

ASN BPSDMP dihitung dengan bobot sebagai berikut:

NO	URAIAN PENILAIAN	BOBOT	KETERANGAN
1	Tersusunnya dokumen HCDP	30	Konsep: 10; Dokumen Sah: 30
2	% Kesesuaian Formasi ASN dengan HCDP	25	Thdp Konsep: 10; Thdp HCDP :25
3	% Ketepatan waktu kenaikan Panqkat/iabatan ASN	15	
4	% Gaji dan Tunjangan Tepat waktu	15	
5	% Ketepatan Waktu Perolehan SK Pensiun	15	Jika tahun berjalan tidak ada ASN pensiun nilai 15

Target Indeks Tata Kelola manajemen ASN BPSDMP Tahun 2024 sebesar 0,96.

7. SK.WA.03.05 Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP
- Persentase capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan" masih kosong dikarenakan belum terdapat realisasi.
- IKK 25 Indeks SPBE Kementerian Perhubungan
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sekretariat BPSDM Perhubungan merupakan persentase kehandalan Sistem Informasi di lingkungan Sekretariat BPSDM Perhubungan.

Target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sekretariat BPSDM Perhubungan tahun 2024 sebesar 100%.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana kinerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa *input*, *output* dan *outcome* ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Demikian Rencana Kinerja Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2024 ini disusun sebagai dasar penyusunan dan pengajuan anggaran serta sebagai kesepakatan kinerja yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada tahun anggaran 2024.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN**  
**TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS (SS)</b>	<b>INDIKATOR KINERJA (IK)</b>		<b>TARGET</b>	<b>SATUAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>		<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
SP.WA.03	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	IKP 1	Indeks RB Kementerian Perhubungan;	80	Indeks
SP.WA.02	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum	IKP 2	Rasio Jumlah Peraturan Menteri Perhubungan yang Mendapatkan <i>Class Action</i> oleh Masyarakat Dibandingkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang Dikeluarkan / Ditetapkan (Rasio).	0.1	Rasio
SK.WA.03.01	Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan.	IKK 8	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP.	100	%
SK.WA.03.03	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan Akuntabel.	IKK 13	Indeks Maturitas SPIP BPSDMP;	3,5	Level
		IKK 14	Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP;	91,9	Nilai
		IKK 15	Indeks Pengelolaan aset BPSDMP;	78	Nilai
		IKK 16	Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP;	88.2	Nilai
		IKK 17	Indeks Perencanaan BPSDMP;	84	Nilai

NO	SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA (IK)		TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		IKK 18	Nilai SAKIP BPSDMP;	90	Nilai
		IKK 19	Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP.	73	Nilai
SK.WA.02.01	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum BPSDMP.	IKK 20	Indeks Reformasi Hukum BPSDMP.	90	Indeks
SK.WA.03.04	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan.	IKK 23	Indeks Kelembagaan BPSDMP;	79,5	Nilai
		IKK 9.2	Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP;	74	Indeks
		IKK 24	Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP.	0,96	Nilai
SK.WA.03.05	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP.	IKK 25	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan.	100	%

**SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

HERI SUDARMAJI  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19660907 199403 1 001